

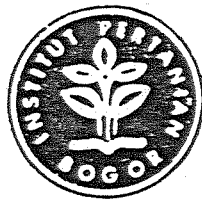
**LOKAKARYA**  
**KULIAH KERJA NYATA (KKN)**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
Bogor, 30 Oktober 1993

**LOK KKN - VI**

***KULIAH KERJA NYATA (KKN) SEBAGAI KEGIATAN  
INTRAKURIKULER PROGRAM PENDIDIKAN PROGRAM S<sub>1</sub>***

*Oleh :*

*Fakultas Perikanan IPB*



**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
1993

**KULIAH KERJA NYATA (KKN) SEBAGAI KEGIATAN  
INTRAKURIKULER PROGRAM PENDIDIKAN PROGRAM S<sub>1</sub> <sup>1)</sup>**

Oleh :

**Kadarwan Soewardi <sup>2)</sup>**

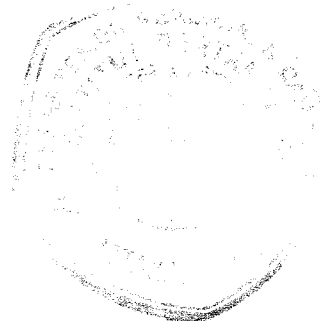
**I. PENDAHULUAN**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai suatu kegiatan intrakurikuler yang bercorak kemasyarakatan telah dilaksanakan IPB selama bertahun-tahun. Koordinasi kegiatan KKN tersebut selama ini dilaksanakan oleh LPM.

Dalam pelaksanaannya, KKN telah mengalami perubahan orientasi dimana yang semula bercorak umum, kemudian diarahkan menjadi lebih bercorak profesi. Terlepas dari penilaian keberhasilan maupun kekurangannya, pelaksanaan KKN selama ini telah dijalankan sesuai dengan misinya. Secara umum kitapun dapat merasakan, dengan adanya program KKN, telah terjadi interaksi yang positif antara mahasiswa, IPB, masyarakat dan pemerintah daerah. Bagi mahasiswa program KKN tidak dapat dipungkiri telah memberikan pengalaman kehidupan kemasyarakatan yang cukup berarti bagi seorang calon sarjana pertanian.

Namun mengingat konsep KKN tersebut dicetuskan dalam waktu yang sudah cukup lama (1973/1974), sudah sewajarnya saat ini dilakukan penelaahan kembali baik dari segi konsep maupun pelaksanaannya. Adanya pertanyaan-pertanyaan yang akhir-akhir ini timbul memang dapat dimengerti karena di dalam program KKN sendiri mengandung hal-hal yang sifatnya dilematis seperti misalnya

- 
- 1) Makalah disampaikan pada Lokakarya KKN IPB di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB, Tanggal 30 Oktober 1993;
  - 2) Pembantu Dekan I Fakultas Perikanan IPB.



antara Program KKN yang bercorak umum tetapi bercorak khusus antara KKN sebagai suatu mata ajaran dan KKN sebagai kegiatan pengabdian, yang tentunya tidak mudah menjabarkannya dalam suatu program yang mencakup keduanya.

Disamping itu adanya beberapa perguruan tinggi yang tidak melaksanakan KKN, timbul pertanyaan apakah KKN ini wajib atau tidak wajib. Dalam berbagai diskusi juga timbul pertanyaan, target masyarakat yang mana yang dimaksudkan dalam program KKN, apakah hanya masyarakat pedesaan, atau bisa juga masyarakat perkotaan, masyarakat bisnis, masyarakat industri dan sebagainya.

Dalam makalah ini akan dicoba mengulas permasalahan KKN yang ada dan kemudian mencari alternatif pemecahannya.

## II. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENYELENGGARAAN KKN IPB

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam proses penyelenggaraan KKN IPB adalah sebagai berikut:

1. KKN yang pada awalnya berasal dari program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, akhirnya pada tahun 1973/1974 dicitakan sebagai kegiatan intrakurikuler yang statusnya sama dengan mata ajaran. Di IPB sendiri KKN tegas-tegas disebutkan sebagai mata kuliah intrakurikuler dengan nomor sandi KKN 400 yang wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa S<sub>1</sub>. Perubahan tersebut memberikan dikotomi pengertian antara pengabdian dan belajar mengabdikan, dimana pada pengabdian diperlukan unsur-unsur keahlian sedangkan belajar mengabdikan tuntutan keahlian tidak mengikat karena memang masih dalam status belajar.
2. Dari sejarahnya maupun rumusan yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksana KKN di perguruan tinggi oleh DIKTI, jelas-jelas dikatakan bahwa KKN adalah suatu program yang sifatnya umum, dimana mahasiswa dalam kegiatannya tidak harus terikat kepada profesinya. Sedangkan KKN IPB lebih diorientasikan kepada program-program profesi namun dalam pemilihan lokasi

polanya masih umum (daerah), bukan profesi. Hal ini menimbulkan permasalahan karena intensitas kepentingan profesi pada suatu daerah tidak sama sehingga akan selalu timbul kesan ketidakcocokan profesi bagi sebagian mahasiswa.

3. Pengelolaan penyelenggaraan secara sentralisasi oleh LPM sebenarnya telah sesuai dengan pedoman KKN DIKTI. Dalam pedoman tersebut peran fakultas hanya ditunjukkan dengan garis konsultatif. Namun dalam KKN yang bercorak profesi, peran fakultas seharusnya tidak sekedar konsultasi, karena wewenang profesi berada di fakultas. Kurangnya peran fakultas, akan menimbulkan permasalahan baik dalam perencanaan pelaksanaan maupun evaluasi. Dalam hal ini LPM IPB sebenarnya telah mencoba meningkatkan peran fakultas, namun dalam pelaksanaannya mungkin dirasa masih belum cukup.
4. Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKN IPB 1993, disebutkan bahwa program kegiatan KKN dititik beratkan kepada bidang keahlian mahasiswa yang dipelajarinya di IPB. Sedangkan kegiatan umum merupakan kegiatan pelengkap (Bab V. hal 5). Hal ini berbeda dengan pengertian filosofis KKN yang ada dalam Pedoman KKN DIKTI (hal 5) dimana dikatakan bahwa dalam program praktek lapangan yang dijadikan modal ber-KKN bukan hanya ilmu yang dipelajarinya secara formal di perguruan tinggi, tetapi juga segala pengetahuan, pengalaman dan intelegensia yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Sebagai konsekuensi dari perbedaan tersebut maka timbul pertanyaan tentang cara pengelolaan disentralisasi maupun sentralisasi. Hal ini dapat dimengerti karena wewenang profesi sebagian besar dimiliki oleh fakultas.
5. Keragaman profesi diantara fakultas di lingkungan IPB maupun keragaman profesi diantara jurusan dalam lingkungan masing-masing fakultas membuat penyusunan program KKN profesi yang cocok untuk semua fakultas/jurusan tidak mudah. Apalagi jika polanya adalah kedaerahan, maka tidak semua profesi akan dapat melaksanakan programnya dengan optimal. Dengan kata lain ada beberapa profesi yang merasa kurang pas di dibandingkan profesi yang lain.

### III. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu dan keterkaitannya dengan arah pendidikan  $S_1$ , maka permasalahan pokok yang perlu dipikirkan adalah apakah masih akan dipertahankan pola KKN profesi seperti sekarang ini, atau pola KKN umum seperti yang telah digariskan DIKTI. Hal ini penting, meskipun KKN profesi yang telah dilaksanakan IPB adalah penjabaran dari KKN yang digariskan DIKTI, tetapi ada penekanan yang berbeda.

Seperti telah diketahui bahwa dalam era pembangunan Jangka Panjang Tahap Ke II, penekanannya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan Agribisnis dan Agri-industri. Pengembangan agribisnis dan agriindustri menuntut kemampuan penyediaan produk yang standar baik kualitas maupun kuantitas, secara kontinu melalui suatu proses yang berprinsip pada efisiensi. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pendidikan program  $S_1$ , maka untuk menunjang pembangunan pada PJPT II nampaknya diperlukan sarjana yang lebih profesional. Meskipun tentu saja wawasan kebangsaan, kemasyarakatan juga tidak dilupakan.

Untuk itu kita perlu menelaah kembali apakah dalam kurikulum program  $S_1$  (diluar KKN), muatan profesinya sudah dianggap cukup atau belum. Jika dirasa belum maka mungkin ada baiknya KKN perlu diboboti muatan profesi, tetapi jika dirasa sudah, maka KKN pola yang umum akan lebih tepat untuk lebih memberi bobot pengalaman kemasyarakatan maupun keterkaitan sektoral.

Sebagai konsekuensi dari pilihan pola tersebut maka tentu penyelenggaraan program KKN perlu disesuaikan dengan pola yang dipilih. Jika pola KKN yang dipilih adalah yang bercorak umum, maka petunjuk pelaksanaan KKN yang digariskan DIKTI dapat digunakan tanpa modifikasi.

Namun jika pola yang dipilih adalah KKN profesi seperti yang telah dijalankan selama ini, maka petunjuk teknis pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan garis wewenang profesi.

Di samping itu, meskipun KKN adalah suatu kegiatan intra-kurikuler yang merupakan pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian, namun dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan lebih tegas yang mana yang perlu mendapat penekanan lebih. Jika status KKN adalah sebagai mata kuliah seperti yang telah dilaksanakan saat ini oleh IPB, maka bobot pendidikan tentunya lebih besar.

Setiap alternatif yang dipilih tentu memiliki keuntungan dan kerugian. Di bawah ini dicoba menyajikan beberapa alternatif pola penyelenggaraan KKN serta keuntungan dan kerugiannya.

### 1. KKN Yang Bercorak Umum

Dalam pola KKN ini kegiatan mahasiswa tidak terikat pada profesinya. Tetapi belajar hidup sebagai anggota masyarakat, tetapi bermodalkan pengetahuan, pengalaman, dan intelegensianya selama belajar di perguruan tinggi baik yang terkait dengan keahliannya maupun bukan keahliannya.

Penyelenggaraan program bercorak umum seperti ini sebaiknya sentralisasi, dimana fakultas sebagai nara sumber. Pedoman teknis pelaksanaan KKN yang telah dikeluarkan DIKTI dapat digunakan sepenuhnya.

#### *Keuntungan*

- Pada program ini mahasiswa mendapat pengalaman memecahkan permasalahan masyarakat secara umum.
- Mendapatkan pengetahuan interdisipliner yang lebih banyak.
- Lebih mengenal kehidupan masyarakat secara umum.

#### *Kerugian*

- Kurang dapat mengekspresikan lebih banyak.
- Atau kurang mendapat pengalaman profesionalnya.

### 2. KKN Yang Bercorak Profesi

Dalam pola ini penekanannya adalah pengabdian mahasiswa kepada masyarakat melalui profesinya.

Penyelenggaraan dalam pola ini bisa ada dua alternatif.

1. Desentralisasi, dimana penyelenggaraan diserahkan kepada Fakultas sepenuhnya.
2. Semi desentralisasi, dimana penyelenggaraan KKN dilakukan bersama-sama oleh LPM dengan fakultas, masalah yang berkaitan dengan perizinan diserahkan kepada LPM sedangkan masalah teknis diserahkan kepada Fakultas.

#### PENUTUP

Pola yang manapun yang akan dipilih dalam penyelenggaraan KKN IPB perlu dipertimbangkan:

1. Keberadaan pedoman pelaksanaan KKN oleh DIKTI.
2. Arah program pendidikan  $S_1$  dalam era pembangunan Jangka Panjang Tahap Ke II.
3. Keseragaman kualitas hasil KKN bagi seluruh mahasiswa IPB.
4. Aspirasi fakultas dalam perencanaan, penyelenggaraan maupun evaluasi hasil KKN.